

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian tentang analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerugian pada PDAM, Christianto (2007), melakukan penelitian pada PDAM Kab. Ngawi, mengungkapkan bahwa PDAM sebagai BUMD diwujudkan dalam bentuk Perusahaan Milik Daerah (Perusda). Perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah yang merupakan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan administrasi dan penggunaannya, sehingga perusahaan milik daerah merupakan bagian yang cukup penting dalam menunjang PAD. Namun dalam kenyataannya penerimaan daerah yang berasal dari badan usaha milik daerah masih relatif kecil bila dibandingkan dengan pajak daerah dan retribusi daerah, bahkan beberapa perusahaan menjadi beban pemerintah daerah karena selalu mengalami kerugian.

Pada kenyataannya dari tahun ke tahun PDAM Kab. Ngawi selalu mengalami kerugian, padahal pendapatan PDAM setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ditambah lagi dengan hutang yang ditanggung perusahaan cukup besar. Dengan kondisi seperti itu, PDAM juga harus memberikan setoran laba kepada pemerintah Kab. Ngawi. Dengan sistem target tersebut, setiap tahun PDAM harus memberikan setoran kepada Pemerintah Daerah Kab. Ngawi sesuai anggaran yang telah ditentukan, baik sedang untung maupun rugi. Banyak sekali

faktor penyebab terjadinya kerugian pada PDAM Kab. Ngawi, antara lain kerugian oleh beban pajak kepada pemerintah daerah, tarif yang berlaku di bawah harga, ketidakakuratan pembacaan angka meter dan adanya kebocoran.

Fibriyanto (2008), melakukan penelitian Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Laba Perusahaan, PDAM Kab. Gunungkidul, menyatakan bahwa ada pengaruh dari variabel biaya dan efisiensi produksi terhadap laba/rugi PDAM Kab. Gunungkidul. Variabel biaya, harga jual dan efisiensi produksi masing-masing berpengaruh signifikan terhadap laba/rugi PDAM di Kab. Gunungkidul untuk wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah pedesaan hanya variabel biaya saja yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap laba/rugi PDAM. Secara simultan variabel biaya, harga jual dan efisiensi produksi mempengaruhi laba/rugi PDAM Kab. Gunungkidul secara signifikan. Biaya merupakan salah satu *instrument* dari laporan laba/rugi, sehingga besar kecilnya biaya yang dikeluarkan akan berpengaruh langsung terhadap laba/rugi dari suatu perusahaan setelah dikurangi dengan pendapatannya. Penentuan harga jual yang tepat juga akan mempengaruhi laba/rugi suatu perusahaan. Dalam jangka pendek harga jual yang tidak ditentukan secara tepat akan berdampak buruk pada perusahaan berupa terganggunya operasional perusahaan. Hal ini dimungkinkan volume penjualan tidak mencapai pada titik yang diharapkan sehingga akan mengganggu aliran kas yang masuk dan akhirnya mengganggu operasional perusahaan. Dalam jangka panjang penentuan harga jual yang tidak tepat akan mengancam kelangsungan perusahaan yang

bersangkutan misalnya perusahaan akan menderita kerugian. Selain biaya dan harga jual, efisiensi produksi juga berpengaruh terhadap laba/rugi perusahaan.

Konsumsi air minum masyarakat di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan, sehingga pendapatan dari penjualan air di perkotaan lebih baik daripada di pedesaan. Baik untuk PDAM wilayah perkotaan maupun pedesaan, variabel harga jual per m³ merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi laba/rugi PDAM di Kab. Gunungkidul. Penentuan tarif air minum harus atas persetujuan DPRD Kab. Gunungkidul, karena hal ini berhubungan dengan kemampuan konsumen PDAM dalam membayar iuran tiap bulannya.

B. Pelaksanaan Monitoring Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)

1. Latar Belakang Kegiatan Monitoring

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak sebagai pengawasan dan pendampingan pada pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Perwakilan BPKP Propinsi DIY Nomor 415.4/KB/01/2008 dan Nomor MOU-1378/PW.12/3/2008 tanggal 13 Mei 2008 tentang Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Direksi PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul berupaya melaksanakan program penyehatan dan peningkatan

kinerja perusahaan, dengan cara meminta bantuan perwakilan BPKP Provinsi DIY untuk mendampingi dalam pelaksanaannya.

2. Dasar Hukum Audit BPKP

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005.
- b. Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor: UM.01.01-Mn/405, tanggal 21 November 2008, hal audit Kinerja PDAM.
- c. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ST-171/PW12/4/2010, tanggal 23 Februari 2010.
- d. Surat Direksi PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul Nomor 65/UM/X/2009, tanggal 12 Oktober 2009 perihal penyusunan SOTK dan Audit Keuangan dan Kinerja TB 2009.

3. Tujuan Audit PDAM

Tujuan audit adalah penilaian atas capaian kinerja PDAM tahun 2009 dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan, dengan sasaran audit sebagai-berikut:

- a. Menguji penyusunan dan pelaksanaan RKAP.

- b. Menilai kinerja PDAM berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 47 Tahun 1999.
- c. Menilai tingkat kesehatan PDAM berdasarkan BPPSPAM.
- d. Menilai potensi perluasan cakupan pelayanan.
- e. Penilai pencapaian 3K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas).
- f. Mengidentifikasi penyebab kehilangan air.
- g. Mengidentifikasi kerugian PDAM disebabkan oleh rata-rata harga jual air di bawah harga pokok penjualan (*full cost recovery*).
- h. Menilai kewajaran kerja sama operasional dengan pihak ketiga (jika ada).
- i. Menilai penyelesaian utang PDAM.
- j. Menilai kesiapan PDAM dalam kesiapan kinerja PDAM investasi 10 juta Sambungan Rumah (2009-2013).
- k. Memetakan penerapan GCG di PDAM.

Cakupan audit atau ruang lingkup audit kinerja adalah kinerja PDAM tahun buku 2009 (BPKP, Laporan Hasil Audit Kinerja PDAM, 2009).

4. Pelaksanaan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP melaksanakan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar tersebut mengharuskan BPKP merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari saji material. Suatu audit meliputi

pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

C. Badan Pengawas PDAM

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 138/KPTS/2008 tanggal 12 September 2008 tentang Perubahan Diktum Kesatu Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 21/KPTS/2007 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunungkidul periode 2007-2010 dan Keputusan Bupati Nomor: 22/KPTS/2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunungkidul periode tahun 2007-2010.

Susunan dan Personalia Badan Pengawas adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Drs. Djoko Sasono
2. Sekretaris : Drs. Sumarno
3. Anggota : Bambang Eko Prabowo, B.Sc., SIP.

Susunan dan Personalia Sekretaris Badan Pengawas adalah sebagai berikut:

1. Ketua : I Ketut Santosa, SE, M.Si.
2. Sekretaris : Iim Zaenal Alim, SIP, MM.

D. Penilaian Kinerja Perusahaan

Penilaian kinerja merupakan suatu pedoman untuk mengetahui dan menilai hasil kerja selama periode waktu tertentu. Dalam persaingan usaha yang semakin ketat dewasa ini, tidak sedikit perusahaan yang gagal dan bangkrut karena tidak mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan usahanya. Salah satu penyebab kegagalan itu adalah karena perusahaan jarang atau bahkan tidak pernah melakukan penilaian kinerja.

Penilaian kinerja merupakan sesuatu yang penting dalam proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian manajemen, sebab hasil penilaian kinerja ini dapat dijadikan dasar untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, bahkan memperbaiki keputusan manajemen ataupun memberi umpan balik kepada karyawan atas kinerja mereka. Penilaian kinerja merupakan pedoman yang diharapkan dapat menunjukkan prestasi kerja, sehingga bermanfaat bagi pengembangan karyawan sendiri dan perusahaan secara keseluruhan. Pelaku usaha harus mulai mengubah kinerja, dengan tetap percaya diri untuk eksis dan mengedepankan semangat kompetitif (Sutikno, dkk, 2010).

Dalam bahasa Inggris, kinerja seringkali dipadankan dengan istilah *performance* yang berarti sesuatu hasil yang telah dikerjakan. Menurut Prawirosentono (1999), kinerja atau *performance* adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai

dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Definisi lain tentang kinerja perusahaan yaitu sebagai fungsi hasil-hasil pekerjaan, kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan selama periode waktu tertentu (Tika, 2006).

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu organisasi publik yang berbentuk perusahaan daerah yang jumlahnya banyak dan memiliki peran besar dalam kegiatan penyediaan air bersih bagi masyarakat. Hampir seluruh kota dan kabupaten di Indonesia memiliki PDAM. Sebagai perusahaan publik yang memiliki peran cukup besar dalam mengolah dan menyediakan air bersih, PDAM harus senantiasa menempatkan diri sebagai motor penggerak dalam masyarakat, artinya PDAM harus mampu melaksanakan perannya dalam masyarakat secara optimal, yaitu selain untuk memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, PDAM juga harus memperhatikan peran sosialnya yaitu memberikan pelayanan yang baik dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Pelayanan tersebut diwujudkan dalam bentuk kinerja yang berorientasi kepada publik.

Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian prestasi perusahaan yang diukur dalam bentuk hasil-hasil kerja (*performance outcome*). Penilaian terhadap Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul

dilakukan setiap akhir tahun buku berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 47 Tahun 1999 tanggal 31 Mei 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum. Oleh karena itu, informasi secara rutin tentang kinerja, baik manajemen, karyawan, maupun perusahaan sangat penting untuk turut serta menentukan kebijaksanaan perusahaan secara keseluruhan.

E. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan/aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data/aktivitas tersebut. Laporan keuangan merupakan alat untuk mengetahui kondisi keuangan suatu organisasi pada periode waktu tertentu. Laporan keuangan ini dipakai sebagai dasar oleh manajemen untuk mengambil keputusan-keputusan strategis dalam mengelola sumber-sumber suatu organisasi. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai seberapa baik perusahaan telah menjalankan kegiatan usahanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan keuangan dapat juga digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengarahkan perusahaan melalui kebijakan perusahaan yang didasarkan pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Informasi-informasi yang disajikan melalui analisis laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. Laporan keuangan harus disiapkan secara periodik untuk pihak-pihak yang berkepentingan antara lain, masyarakat, pemerintah, pemasok, kreditur, pemilik manajemen perusahaan, investor, pelanggan dan karyawan (Barlian dkk, 2002).

Perusahaan memiliki kewajiban untuk memonitor kegiatan dan hasil yang telah dicapai oleh tiap-tiap bagian dalam perusahaan. Setiap individu dalam perusahaan, khususnya staf manajemen, harus mempunyai pandangan dan sikap yang profesional untuk meningkatkan hasil yang telah dicapainya. Pandangan dan sikap profesionalisme harus tampak dalam kegiatan manajemen, baik dalam menganalisis kondisi perusahaan maupun mengambil keputusan-keputusan strategis melalui laporan keuangan. Menurut Sanjaya (2005), dalam penelitiannya mengatakan, bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam mengambil keputusan bisnis dan ekonomi. Informasi dikatakan relevan jika informasi ini kapabel sebagai salah satu informasi di dalam pengambilan keputusan yang berbeda.

Dalam setiap laporan keuangan perusahaan, akan dapat diketahui bagaimana kondisi dan kinerja perusahaan. Pada dasarnya setiap laporan

keuangan akan menggambarkan keadaan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam empat kemungkinan, yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan memperoleh laba dan “kaya dengan kas”

Merupakan idaman semua direktur keuangan sebab perusahaan memiliki fleksibilitas dalam menggunakan dananya, selain dapat membayar dividen juga dapat melakukan investasi, sehingga akan lebih meningkatkan laba lagi di kemudian hari, serta dapat membayar bermacam kewajiban lainnya.

2. Perusahaan memperoleh laba namun “miskin akan kas”

Keadaan seperti ini akan menyulitkan direktur keuangan, sebab ia harus berani mengusulkan kepada semua dana dan mencari tahu penyebabnya.

3. Perusahaan mengalami rugi tetapi “kaya dengan kas”

Keadaan semacam ini biasanya dialami oleh perusahaan yang melakukan investasi yang besar dengan menggunakan pinjaman dalam mata uang asing. Adanya isvestasi yang demikian itu selain mengakibatkan naiknya biaya penyusutan juga mengakibatkan kerugian kurs.

4. Perusahaan mengalami rugi dan “miskin akan kas”

Keadaan semacam ini merupakan keadaan yang paling buruk bagi semua orang yang ada di dalam perusahaan dan memerlukan perhatian seluruh manajemen puncak untuk segera melakukan tindakan penyelamatan.

(Supangkat, 2003)

Tingkat analisis keuangan sebagai proses pengolahan data keuangan menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan, memerlukan berbagai alat dan teknis analisis. Alat-alat dan teknik-teknik analisis keuangan diharapkan dapat digunakan untuk memperlihatkan kelancaran usaha dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Dengan diketahuinya informasi tentang kelancaran usaha dan kemampuan menghasilkan laba, maka dapat diungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan sehingga dapat dicari cara pemecahan masalah tersebut secara tepat. Penggunaan alat-alat dan teknik-teknik analisis bergantung pada pihak-pihak yang berkepentingan dan teknik analisis dilakukan dengan membandingkan data keuangan suatu perusahaan pada suatu periode dengan data keuangan perusahaan tersebut periode sebelumnya (Wibisono , 2007). Rasio dapat dihitung dari berbagai kombinasi atau pasangan angka. Dengan menggunakan pos-pos yang ada pada laporan keuangan, dapat disusun suatu daftar angka rasio yang panjang. Tidak ada suatu standar tentang cara dan jenis menghitung rasio-rasio tersebut (Prastowo dan Juliaty, 2005).

Tujuan pokok analisis laporan keuangan adalah memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Walaupun laporan keuangan sifatnya historis, namun biasanya laporan ini memberikan indikator-indikator bagaimana sebuah perusahaan kemungkinan berkiprah dalam periode-periode berikutnya. Indikator-indikator ini mungkin tidak langsung terbukti dan pemakai yang

berkepentingan perlu menganalisis laporan secara cermat guna memperoleh informasi tertentu yang sesuai dengan tujuan mereka (Simamora, 2000).

Laporan Keuangan PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul, terdiri-dari:

1. Neraca

Neraca memperlihatkan gambaran tentang aktiva dan sumber-sumber keuangan untuk membeli aktiva tersebut pada suatu saat. Neraca terdiri atas dua sisi, yaitu (1) aktiva yang menunjukkan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, dan (2) pasiva yang menunjukkan dari mana dana untuk memperoleh aktiva tersebut. Sisi aktiva terdiri atas aktiva lancar (*current assets*) dan aktiva tetap (*fixed assets*). Sisi pasiva terdiri atas hutang lancar (*current liabilities*), hutang jangka panjang (*long-term debt*) dan modal sendiri pemegang saham (*shareholders, equity*). Menurut Soemarso (2002), neraca adalah daftar aktiva, kewajiban dan modal perusahaan pada suatu saat tertentu, misalnya pada akhir bulan.

Pos-pos neraca dalam laporan keuangan PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul, terdiri-dari:

- a. Kas dan Bank, adalah saldo kas di bank merupakan hasil setoran pendapatan setiap hari.
- b. Investasi Jangka Pendek, merupakan saldo deposito pada bank.
- c. Piutang Usaha

- d. Piutang Lain-lain, merupakan selisih kurang opname rekening air.
- e. Pendapatan Yang Akan Diterima, merupakan pendapatan bunga deposito.
- f. Persediaan
- g. Aktiva Tetap
- h. Aktiva Yang Belum Digunakan, merupakan nilai aktiva tetap yang direklasifikasi menjadi aktiva yang belum digunakan karena sejak pembangunannya belum pernah berfungsi sebagaimana mestinya.
- i. Bahan Instalasi, merupakan nilai bahan persediaan untuk instalasi pengolahan, transmisi distribusi serta sambungan rumah.
- j. Pembayaran Bagian Laba Pemerintah Kabupaten, merupakan pembayaran uang muka laba pada pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- k. Uang Jaminan, merupakan nilai uang jaminan penyambungan listrik yang dibayarkan ke PLN.
- l. Aktiva Yang Tidak Digunakan, merupakan nilai aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi untuk operasional PDAM
- m. Hutang Lainnya/Non Usaha, merupakan saldo hutang non usaha atas pembayaran upah pemasangan SR.
- n. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

- o. Jaminan Langganan, merupakan jaminan yang diterima karena adanya pemasangan instalasi air minum baru dan pengembaliannya pada saat keputusan sambungan/pelanggan menyatakan berhenti untuk berlangganan air dari PDAM.
- p. Cadangan Dana Meter, merupakan akumulasi dana yang diterima dari pelanggan yang dicadangkan untuk penggantian water meter.
- q. Kekayaan Pemerintah Daerah Yang Dipisahkan, merupakan kekayaan penyertaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada PDAM.
- r. Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya, merupakan penyertaan Pemerintah Pusat atau Daerah yang belum dapat ditentukan statusnya, terdiri-dari:
 - 1) DIP Proyek PAT DIY
 - 2) DIP Proyek PSAB DIY
 - 3) DIP Proyek P3KT Kabupaten Gunungkidul
 - 4) DIP PPAB DIY
- s. Modal Hibah, merupakan modal sumbangan. Sesuai Surat Menteri Pekerjaan Umum No S-154/MK.C3/1992 tanggal 23 Desember 1992, terdiri-dari sarana dan prasarana air bersih melalui proyek dan bekas P3P tahun2004, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) BA tanpa nomor tanggal 10-01-2001
 - 2) BA tanpa nomor tanggal 10-01-2002

3) BA tanpa nomor tanggal 03-01-2003

4) BA tanpa nomor tanggal 21-02-2004

5) BA tanpa nomor tanggal 26-02-2004

t. Selisih Likuidasi

u. Laba Rugi Tahun Lalu.

v. Laba (Rugi) Tahun Berjalan

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi (*income statement*) mengukur kinerja perusahaan selama jangka waktu tertentu, biasanya selama satu triwulan atau satu tahun.

Hal pertama yang dilaporkan pada suatu laporan rugi laba biasanya adalah pendapatan dan pengeluaran dari operasi utama perusahaan. Bagian selanjutnya meliputi, beban-beban pendanaan seperti bunga yang dibayarkan.

Pajak yang dibayarkan akan dilaporkan secara terpisah. Bagian terakhir adalah laba bersih (yang disebut sebagai *bottom line*) (Ross, dkk, 2009).

Pos-pos laba rugi:

- a. Pendapatan Air, merupakan pendapatan dari penjualan air.
- b. Pendapatan Non Air, merupakan pendapatan yang berasal bukan dari pendapatan air, yang terdiri-dari pendapatan Sambungan Rumah Baru dan pendapatan non air lainnya.
- c. Biaya Sumber Air, merupakan beban biaya sumber air, yang meliputi biaya pegawai, biaya bahan bakar, biaya listrik/PLN, biaya bahan

pembantu dan rupa-rupa biaya operasional; biaya pemeliharaan sumber air; biaya air baku dan biaya penyusutan sumber air.

- d. Biaya pengolahan air, merupakan biaya penyusutan aktiva tetap yang terkait dengan pengolahan air.
 - e. Biaya Transmisi dan Distribusi, merupakan beban biaya transmisi dan distribusi, pemeliharaan dan penyusutan.
 - f. Biaya Umum dan Administrasi, meliputi biaya pegawai, biaya kantor, biaya pemeliharaan, biaya penyisihan/penghapusan piutang, rupa-rupa biaya umum dan biaya penyusutan.
 - g. Pendapatan Lain-Lain, mencakup pendapatan dari bunga deposito/jasa giro/bunga tabungan, dan biaya lainnya.
 - h. Biaya Lain-lain, terdiri-dari biaya bunga bank, biaya potongan rekening Data Zeni Bangunan (Denzibang), dan biaya lain-lain.
3. Laporan Perubahan Ekuitas .
 4. Laporan Arus Kas, disusun berdasarkan kas selama periode laporan dan harus menunjukkan semua aspek penting dari kegiatan PDAM.
 5. Catatan Atas Laporan Keuangan, berisikan catatan umum organisasi, kebijakan akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, penilaian piutang usaha, persediaan, pengeluaran barang modal dan usaha serta aktiva tetap dan penyusutan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan PDAM adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban dan modal PDAM pada waktu tertentu.
- b. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
- c. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban dan modal PDAM.
- d. Memberikan informasi kinerja manajemen PDAM dalam suatu periode.

Selain dari tujuan tersebut, banyak pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengetahui lebih mendalam tentang laporan keuangan perusahaan. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Ada beberapa pihak yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan, antara lain:

a. Masyarakat

Masyarakat merupakan *stakeholder* mempunyai kepentingan untuk mengetahui keuntungan atau kerugian yang dialami oleh PDAM, dengan maksud masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih bagus dari PDAM, terutama menyangkut 3K.

b. Pemerintah

Bagi pemerintah laporan keuangan PDAM diperlukan untuk mengetahui dan memantau tingkat kinerja perusahaan, sehingga pemerintah bisa

memberikan saran dan masukan atas hasil yang telah dicapai oleh PDAM.

c. Karyawan

Karyawan berkepentingan untuk mengetahui kondisi perusahaan terutama dari sisi keuangannya, karyawan mengharapkan peningkatan kesejahteraan apabila perusahaan mendapatkan keuntungan, dan sebaliknya bila perusahaan mengalami kerugian, maka akan bersama meningkatkan kinerja.

d. Manajemen Perusahaan

Untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan, juga untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

F. Pendapatan.

Pendapatan adalah seluruh pendapatan, baik pendapatan usaha maupun di luar usaha yang diakui pada saat timbulnya transaksi dan atau pada masa prestasi dinikmati, yaitu:

1. Pendapatan penjualan air tiap-tiap bulan berdasarkan rekening air yang diterbitkan pada bulan yang bersangkutan, walaupun penerimaan uangnya baru terjadi kemudian, atau saat penerimaan untuk transaksi penjualan tunai.
2. Pendapatan sambungan baru dan pendapatan non air lainnya:

- a) Pendapatan sambungan baru diakui setelah diterbitkan Daftar Rekening Ditagih Sambungan Baru (DRP NA).
- b) Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran oleh pelanggan yang melebihi batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan.

G. Biaya

Merupakan biaya keseluruhan seperti biaya yang harus dikeluarkan untuk pembayaran listrik, air, telepon, pembelian sarana dan prasarana, dll (Laporan Tahunan PDAM Gk., 2009).

H. Persediaan

Persediaan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu bahan instalasi yang berupa pipa dan *accessories* serta bahan operasi yang terdiri-dari bahan kimia dan bahan operasi lainnya (Laporan Tahunan PDAM Gk., 2009)

I. Aktiva Tetap dan Penyusutan

Aktiva tetap dinilai dengan harga perolehan, yaitu harga beli termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aktiva tetap siap digunakan. Pengertian penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (Standar Akuntansi Keuangan, 1996). Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Dalam Laporan Penelitian yang dilakukan oleh

Santoso, dkk, (1999), pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap, baik karena semakin buruk fisiknya atau karena faktor kualitas. Kalau nilainya tidak menurun secara bertahap, maka tidak dapat disusut tetapi langsung dibiayakan. Adapun aktiva yang tidak dapat disusut adalah tanah, *financial asset*, barang dagangan dan persediaan.

Untuk perhitungan penyusutan aktiva tetap menggunakan metode sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 1983 jo Undang Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.

Kelompok bangunan:

1. Bangunan permanen, tarif penyusutan 5% dari nilai perolehan.
2. Bangunan tidak permanen, tarif penyusutan 10% dari nilai perolehan.

Kelompok bukan bangunan:

1. Kelompok I, yaitu harta yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. Tarif penyusutan 25% dari nilai perolehan.
2. Kelompok II, yaitu harta yang mempunyai masa manfaat 8 tahun. Tarif penyusutan 12,5% dari nilai perolehan.
3. Kelompok III, yaitu harta yang mempunyai masa manfaat 16 tahun. Tarif penyusutan 6,25% dari nilai perolehan.

4. Kelompok IV, yaitu harta yang mempunyai masa manfaat 20 tahun. Tarif penyusutan 5% dari nilai perolehan (Laporan Tahunan PDAM Gk, 2009).

J. Tunggakan/Piutang

Adalah tunggakan rekening air, baik tunggakan yang akan tertagih maupun tunggakan yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang pada setiap akhir tahun ditentukan berdasarkan kelompok umur (*aging schedul*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 7
Besarnya Penyisihan Piutang Berdasarkan Kelompok Umur

Umur Piutang	Penyisihan	Klasifikasi
Di atas 3 bulan s/d 6 bulan	30%	Dalam perhatian
Di atas 6 bulan s/d 12 bulan	50%	Kurang lancar
Di atas 12 bulan s/d 24 bulan	75%	Ragu-ragu
Di atas 24 bulan (2tahun)	100%	Piutang tak tertagih

Sumber: Laporan Tahunan PDAM Tirta Handayani Kab. Gk, Tahun Buku 20089

K. Efektivitas Penagihan

Merupakan tolak ukur untuk menilai efektivitas upaya manajemen dalam pengendalian piutang, menilai berapa piutang tertagih menjadi kas (Laporan Tahunan, 2010)

L. Tarif

Sumber dana PDAM berasal dari pendapatan yang diterima dari penjualan air yang dibebankan kepada pelanggan dan dibayarkan tiap bulan permeter kubik pemakaian air. Besarnya pembayaran ditentukan oleh tarif dasar air yang telah

ditetapkan oleh pihak PDAM dengan persetujuan pemerintah. Tarif dasar air adalah harga minimal air minum yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaian air dan penetapannya selalu disesuaikan dengan klasifikasi dari pelanggan. Tarif air ini merupakan sumber pendapatan yang utama bagi PDAM untuk menjamin kelancaran operasional

Tarif dasar air yang ditetapkan oleh PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul saat ini masih di bawah biaya yang dikeluarkan untuk 1 m³ air atau terjadi defisit sehingga mengakibatkan PDAM belum bisa mendapatkan laba. Tarif dasar air ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan tarif terbaru ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul No.133/KPTS/2009 adalah sebagai berikut.

Tabel 8
Tarif Air Minum PDAM Tirta Handayani Kab.Gunungkidul th 2009

No.	Kategori Pelanggan	Dasar Pengenaan Tarif				
		0-10m ³ (Rp)	0-20m ³ (Rp)	11-20m ³ (Rp)	21-30m ³ (Rp)	31m ³ dst (Rp)
1	Sosial Umum	2250		2500	2750	3000
2	Sosial Khusus	2250		2500	2750	3000
3	RT A	3000		3250	3750	4250
4	RT B	3250		3750	4250	4750
5	Instansi Pem.	3250		3750	4250	4750
6	Niaga Kecil		6000		6500	7000
7	Niaga Besar		7000		7500	8000
8	Industri Kecil		8000		8500	9000
9	Industri Besar		9000		9500	10000
10	Warung Air		7500		7500	7500
11	Pelabuhan		9000		12000	16000

Sumber: PDAM Tirta Handayani Kab. GK

Keterangan:

- 1) Sosial Umum, meliputi HU, WC umum, terminal air, dan lainnya yang sejenis.
- 2) Sosial Khusus, meliputi panti asuhan, yayasan sosial, sekolah negeri/swasta, tempat ibadah, dan lainnya yang sejenis.
- 3) Rumah Tangga A, yaitu pelanggan rumah tangga yang hanya berfungsi sebagai sarana tempat tinggal.
- 4) Rumah Tangga B, yaitu rumah selain sebagai sarana tempat tinggal juga sebagai tempat usaha yang menghasilkan keuntungan.
- 5) Instansi Pemerintah, meliputi rumah sakit pemerintah, badan/instansi/kantor pemerintah dan TNI/Polri, dan lain sebagainya yang sejenis.
- 6) Niaga Kecil, meliputi kios/warung/toko, kantor perusahaan swasta, praktek dokter/bidan, biro jasa, losmen/penginapan, rumah sakit swasta tipe C/D, dan lainnya yang sejenis.
- 7) Niaga Besar, meliputi importir/eksportir, ekspenditur, pasar swalayan, rumah sakit tipe A/B, POM bensin, distributor, hotel/restoran, bengkel besar, dan lainnya yang sejenis.
- 8) Industri Kecil, meliputi kerajinan tangan, kerajinan RT, perusahaan perakitan/karoseri, usaha konveksi, peternakan kecil, dan lain sebagainya yang sejenis.

- 9) Industri Besar, meliputi pabrik mobil, peternakan besar, pertambangan, pabrik kimia, pabrik makanan/minuman, pabrik es, pencucian kendaraan, dan lainnya yang sejenis.
- 10) Kelompok Khusus, meliputi warung air, pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan lainnya yang sejenis.

M. Kebocoran

Adalah air yang didistribusikan tetapi tidak tercatat jumlahnya dalam meter air pelanggan. Tingkat kehilangan air yang ditolerir adalah 20%. (Laporan Tahunan PDAM, 2010).